

# KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI BALI

Cici Noer Alfiyani

NPP. 30.0529

*Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat*  
*Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*  
Email: Cicinoeralfiyani@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si.

## ABSTRACK

**Problem Statement/Background (GAP):** This study discusses disaster risk, especially tsunami risk in 5 districts/cities on the south coast of Bali Island which are included in the high-risk class. The five regions include Jembrana Regency (score 18.10), Tabanan Regency (score 15.11), Denpasar City (score 14.89), Klungkung Regency (score 13.53), and Bandung Regency (score 12.10) (IRBI, 2021). **Purpose:** This study examines the knowledge of Bali Provincial Government Preparedness in facing disaster risks on the island of Bali, with the presence of inhibiting factors in carrying out preparedness on the island of Bali and explains the efforts made by the Provincial Government of Bali. **Methods:** This study uses qualitative methods with a deductive approach as well as data collection techniques using documentation, interviews, and observations. **Results:** The results of this study can be concluded that the preparedness of the Bali Provincial Government in Disaster Management has been carried out with village communities and related agencies, but it is still necessary to optimize the supporting components of facilities and infrastructure such as communication aspects that do not understand the plan prepared by the Bali Provincial Government during a disaster emergency. **Conclusion:** Bali Province's preparedness for disasters is good. This can be seen from the various preparations made and the adequate technology.

**Keywords:** Preparedness, BPBD Bali Province, Disaster Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini membahas tentang risiko bencana, terutama risiko bencana tsunami pada 5 kabupaten/kota pada pesisir selatan pulau Bali yang termasuk kelas risiko tinggi. Kelima daerah tersebut yaitu meliputi Kabupaten Jembrana (skor 18,10), Kabupaten Tabanan (skor 15,11), Kota Denpasar (skor 14,89), Kabupaten Klungkung (skor 13,53), dan Kabupaten Bandung (skor 12,10) (IRBI, 2021). **Tujuan:** Penelitian ini mengkaji pengetahuan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam menghadapi risiko bencana di Pulau Bali, dengan adanya faktor penghambat dalam melakukan kesiapsiagaan di Pulau Bali dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif serta teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Penanggulangan Bencana sudah dilaksanakan bersama masyarakat desa dan Dinas terkait, tetapi masih perlu mengoptimalkan komponen penunjang sarana dan prasarana seperti aspek komunikasi yang belum memahami mengenali rencana yang disiapkan Pemerintah Provinsi Bali ketika keadaan darurat bencana.

**Kesimpulan:** kesiapsiagaan Provinsi Bali terhadap bencana sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai persiapan yang dilakukan dan juga teknologi yang sudah memadai

**Kata Kunci :** Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Bali, Penanggulangan Bencana

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Misi negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, untuk selama-lamanya”. Keadilan sosial serta perdamaian (Indonesia UUD., 2022). Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan diantaranya adalah ancaman nyata yaitu bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana, Indonesia memiliki risiko bencana alam yang sangat tinggi. Tempatnya berada di pertemuan Lempeng Pasifik, Lempeng Australia maupun Lempeng Eurasia, Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi. Sebanyak 15 provinsi di Indonesia tergolong memiliki risiko bencana alam sangat tinggi, dan 19 provinsi lainnya memiliki risiko bencana alam sedang, sebagaimana dijelaskan dalam laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021. Nilai Indeks Risiko Bencana pada seluruh provinsi Indonesia pada 2021 berkisar dari skor 60,43 (DKI Jakarta) hingga 164,85 (Sulawesi Barat) (IRBI, 2021).

Letak, geologi, hidrologi, dan jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dan ulah manusia di sana, begitu pula dengan kerusakan lingkungan, korban jiwa manusia, kerugian ekonomi, serta kerugian psikologis, serta berpotensi menghambat kemajuan negara dalam kondisi tertentu. (Bencana, 2022). Indonesia salah satu negara yang rawan bencana dengan jumlah penduduk banyak. Bencana tersebut menyebabkan berbagai faktor alam ataupun akibat dari ulah manusia. Dengan ini terbukti dapat meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Bencana tersebut contohnya tsunami, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, kecelakaan industri serta kecelakaan transportasi yang selalu menjadikan ancaman yang sangat serius untuk penduduk Indonesia. Adanya bencana tersebut merupakan ancaman untuk para kerusakan harta benda ataupun korban jiwa.

Provinsi Bali di selatan Indonesia terdiri dari gugusan pulau. Beberapa pulau kecil tersebar di sekitar pulau yang lebih besar. Bali terletak di gugusan pulau yang dikenal sebagai Sunda Kecil. Jaraknya sekitar 3,2 kilometer dari Jawa dengan panjang 153 kilometer dan lebar 112 kilometer. Suhu di Bali biasanya hangat seperti di daerah lain di Indonesia. Wilayah perbukitan Provinsi Bali merupakan rumah bagi beberapa danau yang indah, seperti Beratan, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Gunung di sekitarnya. (Gunung Abang, Agung, Batukaru, Batur, Catur, dan Sangiang). Bali menempati 5.636,66 kilometer persegi, atau 2% dari total luas daratan Indonesia. Terdapat 9 kota/kabupaten, 55 kabupaten, dan 701 desa/kelurahan, dengan total kepadatan penduduk 602.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah rencana pembangunan resmi provinsi Bali, dan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Bali, baik dulu maupun sekarang, menikmati masa depan yang sejahtera dan menyenangkan. Lebih khusus lagi, visi pembangunan Bali adalah memastikan alam, karma, dan budaya Bali selaras satu sama lain agar harapan, kebutuhan, dan cita-cita karma Bali dalam segala bentuknya terpenuhi dan bahwa pulau ini siap menghadapi masalah serta tantangan tersebut dapat dihadapi untuk masa depan, baik secara lokal maupun internasional. Salah satu jenis risiko yang melekat dengan Bali adalah risiko bencana. Merujuk pada Laporan IRBI 2021, provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan skor indeks risiko pada kelas sedang (skor 124.19) (IRBI, 2021). jumlah

peristiwa bencana sempat mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, namun kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021. Lebih lanjut, situs BNPB menunjukkan bahwa jumlah korban yang menderita pada tahun 2021 lalu adalah sebanyak 149 orang. Adapun kerusakan yang terjadi adalah 29 rumah dan 8 pertokoan. Sementara itu, pada 2020 diketahui terjadi 95 bencana dengan total korban menderita lebih banyak dan kerugian kerusakan pada lebih dari 100 rumah. Jumlah korban menderita pada tahun 2020 maupun 2021 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi kekeringan di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karang Asem yang dampaknya diderita oleh 53.332 orang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah korban dan kerusakan pada kondisi bencana selama tiga tahun terakhir (2019-2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki indeks risiko yang relatif tinggi, telah dilakukan upaya pencegahan pemerintah dan masyarakat yang sudah siap siaga sehingga dampak yang disebabkan dapat ditekan. Pulau Bali perlu lebih siap menghadapi bencana alam, apalagi merupakan salah satu tujuan wisata paling terkenal di Indonesia. Ribuan orang pergi ke Pulau Dewata setiap tahun untuk menikmati keindahannya. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Provinsi Bali memiliki ciri ekonomi yang sangat berbeda. Sebab, pertumbuhan bisnis pariwisata sangat penting bagi perekonomian Bali. Jadi, industri pariwisata yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Bali berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi pulau tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dengan bantuan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha bertanggung jawab terhadap kegiatan kesiapsiagaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sejalan dengan Visi Pembangunan Provinsi Bali, Pemerintah Bali telah melakukan banyak hal untuk membantu kesiapsiagaan bencana. Ini termasuk bekerja sama dengan Palang Merah Perancis untuk mendirikan Crisis Center, bekerja sama dengan Sistem Peringatan Dini Tsunami Jerman-Indonesia (GITEWS), memasang sirene peringatan dini tsunami di sembilan titik, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memasang tanda-tanda evakuasi, dan mengadakan pelatihan bahaya tsunami. (Kertawidana, 2019).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, diperlukan suatu kajian yang mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan indeks risiko bencana tinggi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil Judul **“Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali”**.

## 1.2 Kesenjangan Masalah

Wilayah Provinsi Bali dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust dan sesar Lombok Strait Strike-slip Fault (PUSGEN, 2017). Pada tahun 2021, terjadi gempa di Provinsi Bali yang mengakibatkan longsor sehingga beberapa desa terisolasi di Kintamani. Selain gempa, ancaman bencana abrasi juga terjadi di beberapa titik wilayah pesisir seperti Pantai Kuta dan Jembrana (IRBI, 2021). Selain itu, dilansir dari Tribun-Bali.com disebutkan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di Bali, menimbulkan berbagai macam kerusakan pada fasilitas umum serta kerugian secara materi pada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, pun merilis angka kerugian yang diderita enam kabupaten yang mengalami bencana alam tersebut. Enam kabupaten tersebut yakni Karangasem, Jembrana, Tabanan, Bangli, Gianyar, dan Badung dengan total kerugian sebanyak Rp 6.613.000.000 dengan jumlah titik kejadian sebanyak 230 titik. Provinsi Bali memiliki beberapa risiko bencana, terutama risiko bencana tsunami pada 5 kabupaten/kota pada pesisir selatan pulau Bali yang termasuk kelas risiko tinggi. Kelima daerah tersebut yaitu meliputi Kabupaten

Jembrana (skor 18,10), Kabupaten Tabanan (skor 15,11), Kota Denpasar (skor 14,89), Kabupaten Klungkung (skor 13,53), dan Kabupaten Badung (skor 12,10) (IRBI, 2021).

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Agung Dan Menghadapi Potensi Ancaman Tsunami. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Dr. I Dewa Ketut Kerta Widana, SKM., MKKK dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa Kesadaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terkait pengetahuan dan sikap potensi ancaman tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Bali sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya- upaya pemerintah dalam mensosialisasikan potensi ancaman tsunami kepada masyarakat dan wisatawan.

Kedua, Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Victim Pada Situasi Bencana Erupsi Gunung Agung Di BPBD Provinsi Bali. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Amy Juniasari dengan lokus Provinsi Bali menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa siap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam membantu korban dalam situasi bencana, seperti saat Gunung Agung meletus.

Ketiga, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesiapsiagaan Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar dengan lokus Kabupaten Sinjai menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai.

Keempat, Kajian Efektivitas Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Pra-Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wahyuni dengan lokus Kabupaten Soppeng menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja kebijakan perencanaan pra banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng

Kelima, Kajian Analisis Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengendalian Dampak Bencana Banjir Di Masyarakat Kecamatan Kawaly. Kajian yang dilakukan oleh Miftahul Ridho dengan lokus Kecamatan Kawaly Kabupaten Aceh Barat menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari kelima penelitian di atas. Fokus Kajian Pada kesiapsiagaan pemerintah Daerah bali dalam penanggulangan bencana dengan metode penelitian kualitatif dan lokasi penelitian di BPBD Provinsi Bali.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam menghadapi risiko bencana di Pulau Bali, Apa saja faktor penghambat Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan kesiapsiagaan, Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelesaikan faktor penghambat.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian metode kualitatif. Creswell menggambarkan peneliti sebagai orang utama yang menemukan dan mengelola informasi atau data berupa teks atau kata-kata dari sumber (Creswell John W dan C.N. Poth, 2007). Penelitian ini menggunakan teori Kesiapsiagaan menurut (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Informan pada penelitian ini terdapat 9 informan. Pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Arikunto, 2006) pengertian *purposive sampling* yakni teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. sumber data Penelitian ini di peroleh dari sumber data menurut Arikunto, mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari pada data dapat diperoleh. Selanjutnya (Arikunto S. , 2010), juga mengemukakan bahwa sumber data dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *person*, *place* dan *paper*. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis menggunakan hal-hal seperti observasi, wawancara, dan pencatatan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam menghadapi risiko bencana di Pulau Bali.

Kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana langkah yang akan dilakukan yakni menyalakan sirine, alarm, kentongan sebagai penanda adanya peringatan dini karena adanya bencana, adapun mitigasi adalah langkah yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi seperti adanya kegiatan membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan dan memberikan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk masyarakat yang tinggal dirawan bencana.

#### 1. Pengetahuan dan Sikap terhadap Resiko

Pengetahuan bagian dari salah Satu faktor utama serta menjadikan kunci terhadap kesiapsiagaan. Pengetahuan ini dapat dimiliki oleh setiap individu tangga terhadap kejadian alam maupun bencana alam (sumber ataupun lokasi), kerentanan fisik bangunan (bentuk maupun fondasi). Adapun pengetahuan yang dimiliki setiap individu yang mempengaruhi sikap maupun siaga terhadap mengantisipasi bencana terutama yang tempat tinggalnya di daerah rawan bencana. Pengetahuan yang meliputi: adanya program pelatihan kebencanaan atau yang berhubungan dengan kebencanaan yang melibatkan semua komponen manajemen dan terdokumentasi, berpartisipasi dalam pelatihan singkat kebencanaan yang diberikan oleh Dinas/instansi yang relevan yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan, melakukan sosialisasi kebencanaan dilingkungan perusahaan.

Pengetahuan dan kemampuan terhadap risiko terhadap peranan yang sangat baik bagi masyarakat dan relawan ataupun aparat pemerintah yang terlibat menjadi sangat penting karena sumber informasi terkait keadaan/kondisi yang berada di sebuah daerah. Kesiapsiagaan ini mengantisipasi adanya bencana dan selalu mengadakan koordinasi dengan Trantib di wilayah Provinsi Bali untuk tetap kondusif, nyaman dan tentram.

#### 2. Kebijakan dan Panduan

Dengan adanya kebijakan yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang dijelaskan dalam rangkaian kejadian yang dapat memberikan berbagai macam ancaman yang dapat menyebabkan adanya faktor alam ataupun faktor non alam dan faktor manusia yang akan menyebabkan adanya korban jiwa bahkan rusaknya lingkungan. Adapun pemerintah yang menyusun rencana dalam penanggulangan bencana yang dimulai dari inisiatif dan adanya komitmen pemerintah yang selanjutnya

berhubungan terhadap penanggulangan pasca bencana yang dapat mengantarkan disetiap perubahan paradigma yang mengatasi setiap bencana alam di wilayah Indonesia. Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali yang dapat melakukan penguatan terkait penanggulangan bencana yang sangat penting dalam meningkatkan upaya dalam kesiapsiagaan secara sistematis.

### **3. Rencana Keadaan Darurat**

Perencanaan ataupun rencana tanggap darurat bagian dari suatu aktivitas dapat dilakukan oleh tim BPBD dengan memiliki tujuan seperti mengantisipasi datangnya keadaan darurat sehingga semua orang mendapatkan kenyamanan di tempat kerja. Hal ini selaras dengan program kerja dalam penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Bali tidak menangani langsung saat terjadi bencana. Pada fase sebelum terjadi bencana BPBD Provinsi Bali hanya ikut memantau informasi terkait ancaman bencana yang ada. BPBD Provinsi Bali membantu upaya penanggulangan bencana pada fase pasca bencana, yaitu dengan bantuan shelter dan gudang logistik. Di shelter membantu tempat pengungsian untuk korban bencana. Disana BPBD Provinsi Bali mengerahkan Tangannya yang ada di kabupaten / kota yang terdekat dengan kejadian bencana. Setelah shelter berdiri, BPBD Provinsi Bali akan memberikan bantuan logistik langsung kepada pengungsi ataupun melayani kabupaten yang meminta bantuan logistik untuk pengungsi. Bantuan dapat berupa beras, lauk pauk, family kids, selimut, dan perlengkapan pengungsi lain.

### **4. Sistem Peringatan Dini Bencana**

Peringatan dini bagian dari kegiatan dalam setiap pemberian peringatan kepada masyarakat tentang adanya bencana di suatu tempat oleh lembaga ataupun yang berwenang. Adapun setiap ada peringatan dini bencana yang telah diatur beberapa sitem seperti adanya pengamatan gejala bencana, adanya analisis hasil pengamatan gejala bencana serta pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Dengan hal tersebut aksi cepat tanggap dalam menghadapi sistem peringatan dini seperti memberitahukan timbulnya kejadian alam yang berupa bencana. Oleh karena itu terbantu dengan adanya sistem peringatan dini (EWS) ini sangat membantu para petugas untuk melakukan persiapan terjadinya bencana alam sehingga bisa mengatasinya dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur. Dengan memiliki tujuan dalam menyusun pelaksanaan dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh pihak BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam pembuatan skenario mitigasi bencana.

### **5. Kemampuan untuk Memobilisasi Sumber Daya**

Keterlibatan masyarakat dalam pelatihan/simulasi kesiapsiagaan untuk mengantisipasi penanggulangan bencana alam yang akan terjadinya, oleh karena itu dapat mengurangi risiko bencana dengan demikian meminimalisir adanya korban. Kemampuan mobilisasi tersebut meliputi berbagai macam keterampilan-keterampilan yang diikuti seperti pendanaan, prasarana dan sarana lainnya. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga terampil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan serta pengetahuan yang telah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana. adanya pelatihan tentang kesiapsiagaan dengan menghadapi bencana dapat memberikan suatu gambaran langkah apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana sehingga bisa terhindar dari berbagai dampak bencana secara fisik ataupun nonfisik.

### **3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Bali**

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang mempunyai sifat menghambat ataupun menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu yang akan terjadi. Adapun faktor penghambatnya yakni seperti dari segi kelembagaan, disiplin aparatur, anggaran, sumber

daya, fasilitas dan lingkungan yang tidak kondusif. Menurut penjelasan Chassario Maraden., S.Kom memiliki jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda yakni sebagai berikut:

“Faktor penghambat pemerintah seperti adanya Bencana alam yang dibagi menjadi 3 yakni bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, secara umum masyarakat Bali sangat siap dengan adanya penghambat yang berawal dari instansi”.

Bencana alam yang dapat merusak rumah dan harta benda di dalamnya dan berbagai infrastruktur. Adapun kerusakan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar

### **3.3 Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat.**

Dengan berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Bali dalam menyelesaikan faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Provinsi Bali pada penanggulangan bencana tahun 2019 untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam upaya pemerintah provinsi Bali untuk mendukung kegiatan.
- b. Provinsi Bali dalam menangani faktor dana/modal yang terbatas dalam penanggulangan bencana telah berupaya dengan pihak luar agar masyarakat tetap berjalan sehingga provinsi Bali bisa beroperasi dengan baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa Dalam mengatasi bencana Provinsi Bali melaksanakan langkah yakni menyalakan sirine, alarm, kentongan sebagai penanda adanya peringatan dini karena adanya bencana, adapun mitigasi adalah langkah yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi seperti adanya kegiatan membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan dan memberikan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk masyarakat yang tinggal di rawan bencana. Dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut, BPBD adalah titik fokus dan pusat koordinasi dalam melaksanakan fase penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan dan partisipasi unsur-unsur TNI di Pulau Bali (Kodam, Lanal, dan Lanud) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan implementasi CSO dalam menjaga negara (di dalam provinsi) dengan hal tersebut dapat melakukan penguatan dan diklat terkait penanggulangan bencana kepada personil personil dalam bagian kedaruratan bersama dengan pemda/lembaga lain bersama dengan BPBD Provinsi Bali. Penguatan ini juga dilakukan untuk personil Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Lalu persiapan ambulans, tenda pelayanan kesehatan darurat, kesiapan rumah sakit dengan *Hospital Disaster Plan*.

## **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi Bali**

kesiapsiagaan yang belum baik yakni perihal SDM yang masih terbatas, akan tetapi dengan kekurangan personil bukan menjadi kendala. Perlu adanya koordinasi dengan BPBD kabupaten kota, sehingga pelayanan terhadap kebencanaan benar-benar ditangani meskipun belum baik. Dalam mengatasi bencana langkah yang akan dilakukan yakni menyalakan sirine, alarm, kentongan sebagai penanda adanya peringatan dini karena adanya bencana, adapun mitigasi adalah langkah yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi seperti adanya kegiatan membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, Dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut, BPBD adalah titik fokus dan pusat koordinasi dalam melaksanakan fase penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan dan partisipasi unsur-unsur TNI di Pulau Bali (Kodam, Lanal, dan Lanud) penanaman pohon bakau, penghijauan hutan dan memberikan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk masyarakat yang tinggal di rawan bencana.

## 2. Faktor penghambat Pemerintah Provinsi Bali

Adapun faktor penghambatnya yakni seperti dari segi kelembagaan, disiplin aparatur, anggaran, sumber daya, fasilitas dan lingkungan yang tidak kondusif.

## 3. Upaya Pemerintah Provinsi Bali menyelesaikan faktor penghambat

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Bali dalam menyelesaikan faktor penghambat yakni sebagai berikut :

- a. Provinsi Bali pada penanggulangan bencana tahun 2019 untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung kegiatan.
- b. Provinsi Bali dalam menangani faktor dana/modal yang terbatas dalam penanggulangan bencana telah berupaya dengan pihak luar agar masyarakat tetap berjalan sehingga provinsi bali bisa beroperasi dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPBD Provinsi Bali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Penelitian tindakan kelas 1
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 diakses melalui [inarisk.bnpb.go.id](https://inarisk.bnpb.go.id) pada 20 Oktober 2022.
- Creswell, J. (2008). Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (Pearson: Prentice Hall).
- Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) diakses melalui <https://dibi.bnpb.go.id/> pada 28 Agustus 2022
- Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Loc. Cit.
- Indonesian Institute of Sciences (LIPI)- UNESCO/ISDR. 2006. Framework Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami. Jakarta.
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Op. Cit., 120
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Op. Cit., 226
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Op. Cit., 120
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Op. Cit., 226-235
- Kertawidana, I Dewa. (2019). Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah untuk Mendukung Pertahanan Negara.
- Dr. I Dewa Ketut Kerta Widana, SKM., MKKK .2019. Kajian Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Agung Dan Menghadapi Potensi Ancaman Tsunami



- Ni Putu Amy Juniasari. 2021. Kajian Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Victim Pada Situasi Bencana Erupsi Gunung Agung Di BPBD Provinsi Bali
- Bahtiar. 2018. Kajian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesiapsiagaan Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai
- Fitria Wahyuni. 2020. Kajian Efektivitas Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Pra-Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
- Miftahul Ridho. 2016. Kajian Analisis Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengendalian Dampak Bencana Banjir Di Masyarakat Kecamatan Kawaly

